

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Implementasi Yuridis Sosiologis

Pengertian Implementasi Menurut Nurdin Usman<sup>11</sup> adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dan menurut Guntur Setiawan<sup>12</sup> implementasi ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Pengertian lain mengenai implementasi menurut Solichin Abdul Wahab<sup>13</sup>, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

---

<sup>11</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 70

<sup>12</sup> Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 39

<sup>13</sup> Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hal. 65

Pengertian yuridis sosiologis<sup>14</sup> adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, di deskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi yuridis sosiologis bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi yuridis sosiologis adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia**

### **1. Definisi Penyiaran**

Menurut disiplin ilmu komunikasi<sup>15</sup>, *broadcasting* adalah cabang dari ilmu komunikasi yang berhubungan dengan penyiaran. “Penyiaran (broadcasting) merupakan kegiatan penyelenggaraan siaran, yaitu

---

<sup>14</sup> Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian hukum, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 1986, Hal. 51

<sup>15</sup> Rahmawati, Indah & Rusnandi, Dodoy, 2011, *Berkarir di Dunia Broadcast Televisi & Radio*. Bekasi – Jawa Barat, Laskar Aksara, hlm. 2

rangkaian mata acara dalam bentuk audio visual yang ditransmisikan dalam bentuk signal suara dan atau gambar.”

Menurut Muhamad Mufid<sup>16</sup> Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Menurut Morisan<sup>17</sup> Penyiaran adalah aktivitas pemancarluasan siaran melalui frekuensi publik agar khalayak dapat menerima pesan yang bersifat masal. Untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya penyiaran. Kelima syarat itu jika diurut berdasarkan apa yang pertama kali harus diadakan adalah sebagai berikut:

1. Harus tersedia spektrum frekuensi radio
2. Harus ada sarana pemancaran/transmisi
3. Harus adanya siaran (program/acara)
4. Harus adanya perangkat penerima siaran (receiver)
5. Harus dapat diterima secara serentak/bersamaan.

Berdasarkan regulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penyiaran adalah proses pemancarluasan siaran dengan menggunakan gelombang elektromagnetik melalui jalur darat, laut, udara secara serentak dengan media penyiaran. Penyiaran pada hakekatnya adalah salah satu

---

<sup>16</sup> Muhamad Mufid, 2017, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta, Kencana, hlm. 67

<sup>17</sup> Morisan, *Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, Tangerang, Ramdina Prakarsa, 2015 hlm. 28

keterampilan dasar manusia ketika berada pada posisi tidak mampu untuk menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif untuk berkomunikasi. Penyiaran dalam konteks ini adalah alat untuk mendongkrak kepastian dan efektivitas komunikasi massa.

## **2. Dasar dan Tujuan Penyiaran**

Dalam UU No. 32 Tahun 2002<sup>18</sup> pasal 2 tentang dasar penyiaran dikatakan “ bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan bertanggung jawab. ”

Tentang tujuan penyiaran pasal 3 UU Penyiaran ini menyatakan bahwa : <sup>19</sup>

*“ Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak, dan jati diri bangsa yang beriman, dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. ”*

Selanjutnya fungsi penyiaran dalam pasal 4 dikatakan bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selain itu, penyiaran juga berfungsi ekonomi dan kebudayaan.

---

<sup>18</sup> Pasal 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

<sup>19</sup> Pasal 3 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Kemudian pasal 5 menyatakan bahwa penyiaran diarahkan untuk:<sup>20</sup>

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- d. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Meningkatkan kesadaran ketaatan hukuman disiplin bangsa
- f. Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup
- g. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran
- h. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi
- i. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab
- j. Memajukan kebudayaan nasional.

---

<sup>20</sup> Pasal 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

### 3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga penyiaran terbagi 4 (empat), yaitu: <sup>21</sup>

1. Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
2. Lembaga penyiaran pemerintah adalah suatu unit kerja organik dibidang penyiaran di lingkungan departemen penerangan yang diberi wewenang khusus, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta berkedudukan di Ibukota Negara, yang stasiun penyiarnya berada di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, dan Ibukota Kabupaten/Kotamadya yang dianggap perlu.
3. Lembaga penyiaran komunitas, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan terbatas, serta untuk melayani komunitas.
4. Lembaga penyiaran berlangganan, adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.

---

<sup>21</sup> Sudirman Tebba, 2007, *Hukum Media Massa Nasional*, Tangerang, Pustaka Irvan, Hlm. 12

Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang

Penyiaran, menyebutkan:<sup>22</sup>

- 1. Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan terlebih dahulu wajib memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.*
- 2. Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.*

Televisi broadcast yang menggunakan sinyal elektromagnet yang bekerja lurus akan menemui kesulitan di daerah berlembah dan berbukit, atau kota yang dipenuhi gedung-gedung tinggi. Frekuensi merambat di udara, bukan tanah. Bisa jadi siaran TV diterima di rumah secara tidak sempurna. Daerah terhalang ini biasa disebut daerah blank spot. Lalu lahirlah TV kabel untuk memenuhi keinginan mereka yang tinggal di daerah blank spot, entah itu di lembah atau bukit atau di apartemen di belakang satu gedung tinggi. Sinyal TV ini merambat di udara namun di distribusikan melalui kabel koaksial (coaxial cable). Kemudian muncul satelit komunikasi yang mengudara jauh di atas sana. Di Amerika Serikat, siaran TV melalui satelit komunikasi pertama diluncurkan di tahun 1962. Dengan satelit, sinyal biasa uplink (naik) ke satelit dan langsung downlink (turun) ke stasiun bumi untuk kemudian retransmit (dipancarkan kembali) ke rumah-rumah.

---

<sup>22</sup> Pasal 25 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Dengan temuan medium kabel dan satelit, siaran televisi broadcast akhirnya Tidak Bisa Gratis lagi. Biaya pemasangan kabel dan penyewaan slot (Transponder) di satelit menjadi alasan utama. Televisi berbayar atau TV berlangganan adalah salah satu yang paling dulu “menikmati” kemajuan teknologi siaran 24 jam ini. Selanjutnya, oprasional selama 24 jam juga mempunyai ongkos tersendiri. Di sinilah mulai istilah Pay TV atau televisi berbayar atau televisi berlangganan seperti HBO. Saat HBO muncul di Amerika Serikat, satu era baru pertelevisian naik ke permukaan: Era TV Berbayar (Pay TV Era). HBO (Home Box Office), salah satu jaringan TV kabel (cable network) berlangganan yang sukses, menayangkan film selama 24 jam seharinya. Tidak menerima iklan sepanjang siaran, uang yang di dapat HBO hanya datang dari biaya berlangganan (subscription free) perbulan. Beberapa CSO (cable system operator) di Indonesia yang bekerja dalam mekanisme uplink-downlink dengan satelit. Terdapat dua macam cara kerja CSO yaitu:

1. Cara kerja CSO macam Indovision : Sinyal HBO (yang dipancar dari Amrik) di-uplink ke satelit, lalu sinyal siaran ini di-downlink oleh CSO sini dipaketkan dengan beberapa channel lain. Selanjutnya CSO mendistribusikan langsung ke rumah dengan system uplink-dowlink via satelit. Sistem ini di kenal dengan nama DBS (direct broadcast satellite/system) atau DTH (direct to home).



2. Kalau cara kerja CSO macam kabel vision sedikit berbeda: Sinyal HBO yang diambil (downlink) dari satelit lalu diantar (deliver) via kabel ke rumah. Lihat bagian “kabel bisa membantu menjangkau area spot.”<sup>23</sup>

Televisi berlangganan tidak lagi identik dengan televisi kabel yang menyalurkan sinyal televisi ke pelanggan-pelanggan melalui kabel. Di Indonesia umumnya televisi kabel tidak dapat diakses secara langsung tetapi melalui operator televisi kabel yang mengumpulkan program-program dari televisi kabel dan menawarkannya dalam bentuk paket kepada pelanggan. Sistem televisi berlangganan semacam ini dinamakan direct broadcasting satellite (DBS) yang memungkinkan pelanggan untuk bisa mengakses langsung sinyal televisi ke televisi. Dalam melayani pelanggannya operator DBS memberikan alat penerima (Parabola) yang dapat menangkap sinyal televisi (microwave) langsung ke satelit kepada pelanggannya. Alat penerima ini dapat memperkuat sinyal lemah yang diterima hingga satu juta kali dan selanjutnya sinyal diproses diperangkat converter sebelum ditayangkan melalui layar televisi. Sumber-sumber program DBS antara lain adalah sebagai berikut:

1. Program sendiri. Operator televisi berlangganan membuat sendiri programnya. Program yang diproduksi sendiri antara lain berita lokal atau talkshow. Operator televisi berlangganan yang memiliki studio sendiri dapat membuat programnya sendiri.

---

<sup>23</sup> Mila Day, 2004, *Buku Pintar Televisi*, Jakarta, Trilogos Library, hlm. 18-23

2. Televisi lokal. Operator televisi berlangganan dapat menangkap sinyal televisi lokal dan memasukannya sebagai salah satu program yang disajikan kepada pelanggan.
3. Televisi khusus (special cable network), yaitu saluran yang menayangkan programnya melalui satelit kepada operator televisi berlangganan. Saluran televisi ini menayangkan iklan (commercials) pada programnya. Dengan demikian, saluran ini mendapat pemasukan dari dua sumber yaitu: biaya langganan dan iklan. Contoh saluran televisi ini adalah CNN dan MTV.
4. Televisi bayar (pay service). Saluran televisi yang tidak menayangkan iklan pada programnya (commercial-free channels). Program yang ditayangkan antara lain film-film bioskop (theatrical movies) dan program yang diproduksi sendiri (original programming). Contoh: HBO, showtime, cinemax, the movie channel.
5. Saluran bayar per program (pay, perview). Saluran ini menetapkan tarif untuk setiap program yang ditayangkan, biasanya program yang ditawarkan antara lain film-film yang baru selesai tayang di bioskop, acara hiburan, dan olahraga.<sup>24</sup>

Di Indonesia beroperasi system televisi kabel pertama yang digelar di wilayah kota Jakarta. Dioperasikan oleh PT. Broadband Multimedia, tbk. dengan nama dagang Kabelvision. Seiring bertambahnya minat penduduk kota Jakarta dan sekitarnya jaringan kabelnya diperluas kearah Tangerang

---

<sup>24</sup> Hidajanto Djamal., Andi Fachruddin, 2011, Dasar – Dasar Penyiaran, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 42-43

dan Bekasi. Pada 2007, Broadband Multimedia mengganti namanya menjadi Firstmedia. Jaringan yang dioperasikan sekarang menggunakan hybrid-fiber-coaxial (HFC). Sekarang Firstmedia telah mengoperasikan layanannya di 3 kota yang masing-masing mempunyai head end di Gedung Citra Graha (Jakarta), Denpasar (Bali), dan Jl. Gubeng (Surabaya).

#### **4. Pengertian Komisi Penyiaran Indonesia**

Komisi Penyiaran Indonesia, sesuai Pasal 1 ayat (1) Peraturan KPI tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia untuk selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPR RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD Provinsi sesuai isi Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPI tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.<sup>25</sup> Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga independen yang mendapat hak eksklusif dari pemerintah untuk pengelolaan penyiaran. Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah

---

<sup>25</sup> Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

publik yang harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia terdiri dari Lembaga Komisi penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja setingkat provinsi.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan pengertian mengenai penyiaran, yaitu pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: <sup>26</sup>

*Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.*

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pun dijelaskan mengenai pengertian siaran, yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : <sup>27</sup>

*Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.*

---

<sup>26</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

<sup>27</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Penyiaran dipahami sebagai pemancarluasan rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran, sebagai cara untuk menciptakan pengalaman bersama bagi jutaan orang yang tinggal bersama dalam komunitas atau negara. Dengan demikian akan tercipta dampak berupa dorongan sosial dan terciptanya proses adaptasi sosial. Selain itu penyiaran berfungsi sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Penggunaan istilah penyiaran secara makro mengacu pada media elektronik radio dan televisi. Menurut peneliti media dari Murdoch University, Krishna Sen, media penyiaran televisi adalah kehidupan pribadi dari sebuah negara bangsa (*the private life of the nation state*). Hal ini menyangkut kepentingan pribadi dan ruang publik sehingga di banyak negara media penyiaran diatur oleh badan khusus yang dibentuk oleh negara.<sup>28</sup>

## **5. Sejarah Terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia**

Terbitnya UU Penyiaran menjadi landasan bagi terbentuknya sebuah lembaga baru yang bersifat independen, maka semenjak 28 Desember 2002 dimulailah babak baru penyelenggaraan sistem penyiaran. Paradigma

---

<sup>28</sup> Krishna Sen, Kuasa dalam Sinema : Negara, Masyarakat dan Sinema Orde Baru, Ombak, Yogyakarta, 2009. hlm. 11.

baru tersebut adalah dengan semakin terlibatnya peran serta dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan dunia penyiaran di Indonesia. UU Penyiaran telah mengamanatkan tentang perlunya kehadiran sebuah lembaga bersifat independen yang merupakan representasi publik. Amanat dari undang-undang tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan UU Penyiaran Pasal 3 :<sup>29</sup>

*Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun*

---

<sup>29</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

*masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.*

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.<sup>30</sup>

### **C. Tinjauan Mengenai Lembaga Sensor Internal**

#### **1. Definisi Sensor Internal**

Sensor internal merupakan sebuah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum yang khusus dilakukan oleh lembaga penyedia penyiaran televisi berlangganan sebagai regulasi untuk diterapkan sebagai upaya pengimplementasian terhadap pedoman perilaku penyiaran yang dikeluarkan oleh KPI.

Dalam pelaksanaannya lembaga penyiaran berlangganan wajib patuh terhadap pedoman penyensoran dan kriteria penyensoran yang dikeluarkan oleh KPI melalui P3SPS agar isi program siarannya dapat disalurkan kepada khalayak umum dengan baik sehingga tidak menimbulkan kontra

---

<sup>30</sup> Web Komisi Penyiaran Indonesia, Profil KPI, <http://www.kpi.go.id/index.php/2012-05-03-14-44-06/2012-05-03-14-44-38/profil-kpi> Diakses pada hari Selasa 27 September 2016

dikemudian hari mengenai isi siaran dari televisi berlangganan tersebut. Sensor film ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif pertunjukan dan/atau penayangan film dan iklan film. Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman, setiap film dan reklame film yang akan disediakan, diekspor, dipertunjukan, dan/atau ditayangkan Wajib Disensor.<sup>31</sup>

Sensor film dilakukan terhadap film dan reklame film yang dihasilkan (produksi) perusahaan pembuatan film nasional dan terhadap film impor. Sensor Film berpedoman pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang LSF.

Dalam pedoman penyensoran suatu film segi- segi yang diteliti dan dinilai adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Keagamaan

1. Kesan anti Tuhan dan anti agama
2. Merusak kerukunan hidup antar umat beragama
3. Menghina salah satu agama yang diakui di Indonesia

b. Ideologi Politik

1. Propaganda ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

---

<sup>31</sup> Sekretariat Lembaga Sensor Film, Panduan dan Pembekalan Sensor, Jakarta: 2003

<sup>32</sup> Sekretariat Lembaga Sensor Film, Sari Informasi Lembaga Sensor Film Periode 2005-2008, Jakarta:2006, hlm 29



2. Ajaran dan/atau pemujaan terhadap ideologi komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, kolonialisme, fasisme.
3. Mengarahkan simpati penonton terhadap butir 2
4. Merangsang timbulnya ketegangan sosial-politik
5. Melemahkan ketahanan nasional/merugikan kepentingan nasional

c. Sosial Budaya

1. Merusak, membahayakan, dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum di Indonesia
2. Ejekan dan/atau menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat-istiadat yang berlaku di Indonesia
3. Merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat
4. Penggambaran keliru tentang perkembangan sosial budaya di Indonesia
5. Mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya

d. Ketertiban Umum

1. Mempertontonkan adegan kejahatan yang mengandung
  - a) Modus operandi kejahatan secara rinci dan mudah menimbulkan rangsangan untuk ditiru
  - b) Mendorong penonton bersimpati terhadap pelaku kejahatan dan perbuatan kejahatannya tersebut
  - c) Kemenangan kejahatan atas kebenaran

2. Mempertontonkan kekejaman dan kekerasan secara berlebihan
3. Menitikberatkan cerita/adegan seks semata
4. Mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, asal keturunan, dan antar golongan (SARA)
5. Penggambaran/pembenaran penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.
6. Menghasut untuk perbuatan melawan hukum.

## **2. Kriteria Penyensoran**

Selain ada pedoman penyensoran, suatu film dalam proses penyensoran harus memenuhi kriteria penyensoran, dimana terdapat bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film :<sup>33</sup>

### **a. Politik**

1. Adegan/penggambaran yang merugikan upaya pemantapan dan pelestarian Pancasila dan UUD 1945
2. Adegan/penggambaran yang membenarkan ajaran komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, Kolonialisme, Fasisme
3. Gambar/lambang yang dapat memberikan sosialisasi atau pemujaan kebenaran komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, kolonialisme, fasisme

---

<sup>33</sup> Ibid, Hlm.33

b. Sosial Budaya

1. Pria atau wanita telanjang atau mengesankan telanjang bulat dilihat dari depan, samping atau belakang
2. Close-up alat-alat vital, paha buah dada atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup
3. Ciuman merangsang oleh pasangan berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan penuh birahi
4. Gerakan atau suara pengenggamaan atau memberi kesan senggama oleh manusia atau hewan dalam sikap terang-terangan ataupun terselubung
5. Gerakan onani, lesbian, homoseksual, seks oral
6. Adegan melahirkan oleh manusia yang dapat menimbulkan birahi
7. Tampilan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai fungsi
8. Adegan yang menimbulkan kesan tidak etis

c. Ketertiban Umum

1. Pelaksanaan hukum mati, digambarkan secara rinci, penyiksaan diluar batas kemanusiaan
2. Tampilan tindakan kekerasan atau kekejaman dan /atau akibatnya yang menimbulkan kesan sadisme
3. Penggambaran kebobrokan pribadi seseorang yang masih hidup atau sudah meninggal, suatu golongan dan/atau lingkungan dalam masyarakat secara berlebihan.

### 3. Upaya Preventif dan Represif Sensor Internal

Usaha penanggulangan preventif ialah upaya pencegahan agar kejahatan itu tidak terjadi artinya kejahatan yang sama tidak dapat timbul kembali. Dengan demikian usaha preventif lebih penting dan lebih diutamakan dari pada tindakan represif. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.<sup>34</sup>

Upaya penanggualangan secara preventif yang dilakukan oleh pihak KPI adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada lembaga-lembaga penyedia jasa layanan penyiaran televisi berlangganan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya preventif ini juga bertujuan agar ketentuan penggunaan sirine dan lampu isyarat dapat ditaati oleh komunitas mobil.

Penanggulangan secara preventif dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu cara moralistik dan cara abolisionistik.

#### 1. Cara Moralistik

Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama atau para pendidik, menyebar luaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Sudjono D, *Kriminologi*, (Bandung : Alumni Bandung, 1970), hal. 46

<sup>35</sup> Soedjono D, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung : Remadja Karya CV, 1984), hal.19

## 2. Cara Abolisionistik

Cara abolisionistik adalah menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya, umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan, maka kesejahteraan masyarakat ditingkatkan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Kejahatan dapat di tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.<sup>36</sup>

Jadi dalam upaya preventif harus melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Proses penanganan penggunaan sirine dan lampu isyarat pada mobil pribadi merupakan upaya penanggulangan secara represif terhadap penggunaan sirine dan lampu isyarat terhadap kendaraan pribadi. Upaya penanggulangan secara represif ialah upaya penanggulangan berupa penindakan terhadap pelaku yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.<sup>37</sup>

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para

---

<sup>36</sup> Sudjono D, *Kriminologi*, (Bandung : Alumni Bandung, 1970), hal. 15

<sup>37</sup> Ibid. hal. 108

pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga pelaku tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya represif yang dilakukan oleh polisi berkaitan dengan penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat pada mobil pribadi yaitu penindakan berupa tilang yang sesuai dengan pasal 287 ayat (4) UU LLAJ. Dengan adanya penindakan berupa penilangan terhadap mobil pribadi yang menggunakan sirine dan lampu isyarat bermaksud agar memberikan rasa jera kepada pengguna sirine dan lampu isyarat di mobil pribadi. Efek jera yang dimaksud adalah supaya pelanggar ketentuan pengguna sirine dan lampu isyarat tidak mengulangi pelanggaran yang sudah dilakukan. Efek jera tersebut juga memberikan pelajaran bagi pengendara lain agar tidak melanggar ketentuan penggunaan sirine dan lampu isyarat.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

#### 1. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Syani, Sosiologi Kriminologi, (Bandung, Remaja Karya, 1987), hal 139

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini di titik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti semula.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan utama, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan

penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Pihak kepolisian sebagai pintu utama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan agar dapat ditegakkan dalam masyarakat, apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka pelanggar hukum tersebut harus diproses hingga mendapatkan penghukuman.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman di jatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdul Syani sebagai berikut:<sup>39</sup> Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar

---

<sup>39</sup> Ibid hal 141



menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Televisi Kabel Berlangganan**

##### **1. Pengertian Tentang Siaran Televisi Kabel Berlangganan**

Secara umum definisi penyiaran menurut Pasal 1 angka 2 UU

Penyiaran adalah<sup>40</sup>

*“ kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di anariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. ”*<sup>41</sup>

Definisi yang diberikan oleh ensiklopedia mengenai penyiaran televisi berlangganan adalah jasa penyiaran saluran televisi yang dilakukan secara khusus untuk pelanggan yang bersedia membayar secara berkala dalam hal ini secara berlangganan. Lembaga penyedia jasa siaran berlangganan biasanya menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit pemancar.

---

<sup>40</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

<sup>41</sup> Pasal 25 Angka 2 Undang – Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Dalam hal ini juga termasuk penyiaran secara berlangganan seperti halnya terdapat dalam Pasal 25 UU Penyiaran dimana: <sup>42</sup>

*lembaga penyiaran berlangganan haruslah berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya diperbolehkan menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Menambahkan bahwa lembaga penyiaran berlangganan dapat memancarluaskan materi siarannya secara khusus kepada pelanggannya melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.*

Lembaga penyiaran berlangganan dalam Pasal 26 UU Penyiaran terbagi atas: <sup>43</sup>

- a. *Lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit*
- b. *Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel dan*
- c. *Lembaga penyiaran berlangganan melalui terrestrial.*

Mengenai pembiayaan lembaga penyiaran berlangganan dapat berasal dari, iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel dalam Pasal 28 UU Penyiaran harus memenuhi ketentuan yakni: <sup>44</sup>

- a. Memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan
- b. Menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Hal selanjutnya mengenai siaran televisi berlangganan diatur lebih rinci kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. Pasal 1 PP Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan mempunyai definisi tersendiri mengenai lembaga penyiaran berlangganan swasta yakni. penyelenggara

---

<sup>42</sup> Pasal 26 Undang – Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

<sup>43</sup> Pasal 26 Undang – Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

<sup>44</sup> Pasal 28 Undang – Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Hal terkait dengan layanan penyiaran berlangganan merupakan layanan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. Khusus mengenai saluran berlangganan adalah spektrum frekuensi elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel dan/atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan.

Mengenai Pasal 3 PP No.52 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan mengatur mengenai segala macam persyaratan dalam mendirikan sebuah lembaga penyiaran, yang tertulis sebagai berikut:

*(1) “ Lembaga Penyiaran Berlangganan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. didirikan oleh warga negara Indonesia;*
- b. didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas;*
- c. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan;*
- d. modal awal usahanya harus seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.<sup>45</sup>*

Setelah mengetahui syarat pendirian lembaga siaran televisi berlangganan, maka selanjutnya perlu diperhatikan mengenai kewajiban penyelenggara penyiaran seperti yang tertera dalam Pasal 12 PP Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan. Dalam menyelenggarakan

---

<sup>45</sup> Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan:

- a) menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan
- b) menyediakan 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar negeri atau paling sedikit 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri.<sup>46</sup>

Keseluruhan mengenai penyelenggaraan penyiaran berlangganan merupakan, kegiatan menyiarkan program siaran melalui televisi oleh lembaga penyiaran yang mengharuskan atau mewajibkan bagi para konsumen untuk membayar sejumlah biaya yang telah disepakati sebelumnya secara periodik.

## **2. Tinjauan Umum Mengenai Siaran Acara Televisi**

Pasal 1 angka 10 UU Penyiaran menyatakan bahwa sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk penyiaran nasional adalah penyiaran televisi yang merupakan media

---

<sup>46</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005

komunikasi massa dengan pandangan, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Berikut merupakan klasifikasi televisi menurut stasiun pemancar yang terbagi menjadi empat yakni:

a. Stasiun televisi dengan pemancar langsung

Stasiun televisi dengan pemancar langsung merupakan stasiun televisi dengan sistem transmisi yang dapat diterima pesawat penerima televisi di rumah-rumah. Sistem tersebut mempunyai beberapa kelemahan yakni, terbatasnya daya pancar dan sifat rambat gelombangnya yang bising, terutama pada daerah penerima yang terhalang oleh gunung atau bangunan yang tinggi, sehingga menyebabkan gelombang yang sampai ke pesawat penerima sangat lemah dan terkadang tidak dapat diterima sama sekali.

b. Stasiun televisi dengan pemancar melalui satelit

Stasiun televisi dengan pemancar satelit adalah stasiun televisi yang sistem informasinya ditransmisikan dari stasiun bumi ke satelit luar angkasa, selanjutnya oleh satelit tersebut ditransmisikan kembali ke pesawat penerima secara langsung yang berada pada cakupan daerah antena satelit.

Pada sistem ini pesawat televisi di rumah-rumah dilengkapi dengan antena dan menerima langsung siaran televisidari satelit. Sistem ini sama dengan pelayanan melalui sentral video yang terbatas di salah

satu tempat hiburan atau hotel. Dapat melapyani delapan sampai dengan sepuluh program sekaligus yang disiarkan secara simultan.

c. Stasiun televisi dengan kabel

Sistem pada stasiun televisi kabel juga dapat disebut *community antenna television* (CAT). Adanya sistem tersebut, dapat memberikan pelayanan khusus bagi penonton pada wilayah tertentu. Sistem ini banyak digunakan oleh penyedia jasa penginapan dan hotel untuk memberikan pelayanan pada tamu-tamu.

Gambar yang dihasilkan dari sistem televisi kabel ini berasal dari pemutaran kaset video yang disalurkan ke pesawat dengan hubungan seri melalui sebuah kabel. Negara luar sering menggunakan dan mengembangkan sistem tersebut dikarenakan dengan televisi kabel bisa memilih beberapa alternatif acara yang disukai.

d. Stasiun televisi dengan link (*Relaying Link Station*)

Stasiun televisi dengan link adalah stasiun televisi dengan sistem sinyal televisi yang ditransmisikan melalui gelombang mikro, yang tidak bisa secara langsung diterima oleh pesawat televisi penerima biasa. Dalam hal ini gelombang yang diterima akan diubah frekuensinya sebelum dipancarkan kembali

Gambar dan suara yang dihasilkan lewat transmisi dengan sistem ini hampir tidak mengalami penurunan kualitas. Keterbatasan dari

sistem ini adalah jika stasiun yang menjadi tujuan berikutnya berada diluar batas pandang lurus, misal pada seberang lautan maka dalam keadaan tersebut dibutuhkan bantuan sistem komunikasi satelit.

Stasiun-stasiun televisi di atas, tentu dalam hal ini mempunyai sebuah siaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa stasiun televisi siaran yakni merupakan stasiun televisi yang berfungsi untuk kegiatan produksi dan menyelenggarakan siaran terbuka kepada masyarakat melalui sebuah pemancar ke suatu kota, daerah ataupun dalam lingkup negara.

Klasifikasi jasa penyiaran melalui stasiun televisi terbagi menjadi empat lembaga penyiaran yang terdapat dalam undang-undang penyiaran di Indonesia yakni sebagai berikut:

a. Lembaga penyiaran publik

Lembaga penyiaran publik merupakan lembaga yang berbentuk badan hukum yang pendiriannya dilakukan oleh negara, mempunyai sifat independen, netral, tidak berorientasi pada laba, dan mempunyai fungsi memberikan layanan siaran televisi demi kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran publik mengenai jasa penyiaran stasiun televisi di Indonesia adalah Televisi Republik Indonesia atau TVRI.

b. Lembaga penyiaran swasta

Lembaga penyiaran swasta merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersil, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang

usahanya khusus untuk menyelenggarakan jasa penyiaran saja. Lembaga penyiaran swasta hanya diperuntukkan bagi badan hukum Indonesia dan/atau warga negara Indonesia saja. Cakupan siaran lembaga ini juga terbatas yakni, hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah tertentu baik lokal, regional, maupun nasional.

c. Lembaga penyiaran komunitas

Lembaga penyiaran ini merupakan lembaga penyiaran yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak berorientasi pada keuntungan, dengan daya siar yang rendah, luas jangkuan wilayah terbatas, serta hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya saja.

d. Lembaga penyiaran berlangganan

Lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum di Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Media komunikasi termasuk mengenai televisi, memiliki karakteristik yang dipergunakan dalam memenuhi tujuan dari komunikasi tersebut. Berikut merupakan karakteristik media televisi dari adanya media televisi:



- a. Memiliki jangkauan yang luas dan segera dapat menyentuh rangsang penglihatan dan pendengaran manusia
- b. Dapat memperlihatkan objek yang amat kecil, besar, berbahaya atau bahkan langka
- c. Menyajikan pengalaman secara langsung pada pemirsa
- d. Penyiaran televisi dapat dikatakan meniadakan perbedaan jarak dan waktu
- e. Mampu menyajikan unsur warna, gerakan, bunyi dan proses secara baik
- f. Dapat dikoordinasikan dengan pemanfaatan berbagai media lain, seperti foto, film, dan/atau gambar dengan baik
- g. Dapat menyimpan berbagai macam data, informasi dan sekaligus menyebarluaskan dengan cepat ke dalam berbagai tempat yang saling berjauhan
- h. Mudah untuk dilihat tanpa perlu pengoperasian yang rumit
- i. Dapat membangkitkan perasaan intim atau media personal.<sup>47</sup>

Terkait dengan isi siaran yang disiarkan melalui televisi telah diatur dalam UU Penyiaran secara umum melalui Pasal 36 ayat (1) yakni,<sup>48</sup>

*isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.*

---

<sup>47</sup> P.C.S Sutrisno, Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video, Gramedia: Jakarta, 1993, hlm. 3-4

<sup>48</sup> Pasal 36 Ayat 1 Undang – Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Selanjutnya, dalam Pasal 36 ayat (3) menyatakan bahwa<sup>49</sup>

*isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-naka dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.*

Hal yang tidak kalah penting bahwa larangan terhadap isi siaran seperti

yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (5) sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. *Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong*
- b. *Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang*
- c. *Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.*

Diatur juga bahwa isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan Internasional.

### **3. Tinjauan Umum Mengenai Klasifikasi Film**

Film merupakan media komunikasi massa pandang dengar dimana film mengirimkan pesan atau isyarat yang disebut sebagai simbol, komunikasi simbol dapat berupa gambar yang ada di film. Gambar di film menunjukkan kekuatan gambar dalam menyampaikan maksud dan pesan kepada orang lain. Secara umum, film dilihat sebagai media tersendiri, film merupakan sarana pengungkapan daya cipta dari beberapa cabang seni sekaligus.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Pasal 36 ayat 3 Undang – Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

<sup>50</sup> Pasal 36 ayat 5 Undang – Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

<sup>51</sup> Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm. 14

Film memerlukan penanganan yang lebih sungguh-sungguh dan konstruksi yang lebih artifisial yakni melalui manipulasi oleh media lain, karena film mempunyai jangkauan, realisme, pengaruh emosional dan popularitas yang hebat. Film juga mudah dipengaruhi, maka banyak dipengaruhi campur tangan oleh berbagai pihak dalam pembuatannya.<sup>52</sup> Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat menunjukkan karakteristik film adalah:<sup>53</sup>

a) Layar yang luas/lebar

Layar film yang luas telah memberikan keleluasaan penontonnya untuk melihat adegan-adegan yang disajikan dalam film. Apalagi dengan kemajuan teknologi, layar film pada umumnya telah tiga dimensi, sehingga penonton seolah-olah melihat kejadian nyata dan tidak mempunyai jarak.

b) Pengambilan gambar

Pengambilan gambar atau shot dalam film memungkinkan dari jarak jauh dan *panoramic shot*, yaitu pengambilan pemandangan menyeluruh. Shot tersebut dipakai untuk memberi kesan artistik dan suasana yang senyatanya, hal tersebut membuat film menjadi lebih menarik.

c) Konsentrasi penuh

Saat menonton film para penonton hanya tertuju pada layar, sementara pikiran perasaan penonton tertuju pada alur cerita.

---

<sup>52</sup>Ibid, hlm. 14

<sup>53</sup> Siti Karlinah dan Lukiat Komala, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, hlm. 145

Dalam keadaan demikian emosi kita juga terbawa suasana, kita akan merasakan emosi sesuai dengan adegan atau cerita yang ditampilkan.

d) Identifikasi Psikologis

Pengaruh film terhadap jiwa manusia tidak hanya sewaktu atau selama duduk digedung bioskop, tetapi terus sampai waktu yang cukup lama, misal peniruan terhadap cara berpakaian atau model rambut.

Penting kiranya untuk mengetahui pula jenis-jenis film agar dapat memanfaatkan film tersebut sesuai dengan karakteristiknya. Film dapat dikelompokkan pada empat jenis yakni: <sup>54</sup>

a. Film cerita

Film cerita, merupakan jenis film yang mengandung sebuah cerita yang lazim dipertunjukan di gedung-gedung bioskop dengan bintang film tenar dan film ini didistribusikan sebagai barang dagangan. Cerita yang diangkat menjadi topik film bisa berupa cerita fiktif atau berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi, sehingga ada unsur menarik, baik dari jalan cerita maupun dari segi gambarnya.

b. Film berita

Film berita adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar-benar terjadi, karena sifatnya berita film yang disajikan kepada publik harus mengandung nilai berita. Kriteria berita tersebut harus penting dan menarik. Film berita dapat langsung terekam dengan

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 148

suaraya, atau film bisu sehingga pembaca berita yang membacakan narasinya.

c. Film dokumenter

Film dokumenter mempunyai definisi sebagai karya cipta mengenai kenyataan. Berbeda dengan film berita yang merupakan rekaman kenyataan, maka film dokumenter merupakan hasil interpretasi pribadi mengenai kenyataan tersebut. Biografi seseorang yang memiliki karya pun dapat menjadi sumber bagi film tersebut.

d. Film kartun

Film kartun dibuat untuk konsumsi anak-anak, bertujuan untuk menghibur, film kartun juga bisa mengandung unsur pendidikan. Minimal akan terekam bahwa kalau ada tokoh jahat dan baik, maka pada akhirnya tokoh baik yang selalu menang.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Pornografi**

### **1. Pengertian Pornografi**

Pornografi bukanlah sebuah fenomena yang baru di Indonesia. Pornografi di Indonesia dapat disamakan dengan perkembangan pornografi yang ada di dunia secara umumnya. Mengenai kata Pornografi berasal dari bahasa Yunani kuno yakni *pornē* dan *graphos*. *Pornē* sendiri mempunyai arti pelacur, yang secara khusus tertuju pada pelacur kelas paling rendah. Dalam masa Yunani Kuno tidak semua pelacur dianggap rendah dan hina. Hanya *porneia* adalah pelacur atau perempuan paling murah, paling

dipandang hina, tidak dihargai dan tidak mendapat perlindungan. Mereka bagai budak seksual bagi seluruh penduduk laki-laki.<sup>55</sup> Graphos mempunyai arti tulisan, sketsa atau gambar. Sehingga arti dari pornografi tersebut merupakan tulisan, sketsa atau gambar tentang perempuan sebagai pelacur kelas murah.

Definisi Pornografi ditentukan tersendiri pada saat Kejaksaan Agung RI tahun 1970 membentuk sebuah tim yang bernama Tim Penelaan Masalah Porno Kejaksaan Agung, yang tersusun atas unsur – unsur agama, pendidikan dan ilmuwan.<sup>56</sup> Tim tersebut mempunyai tugas dalam mencari batasan tentang pornografi. “ Adapun definisi yang dihasilkan dari tim tentang Pornografi adalah perbuatan, gambar, tulisan, lagu, suara, bunyi, benda atau segala sesuatu yang dapat merangsang nafsu birahu manusia, menyinggung rasa susila masyarakat umum serta berakibatnya tindakan maksiat serta mengganggu ketentraman umum.

Sebagaimana tulisan yang diterbitkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan, mengenai definisi pornografi yakni sebagai berikut.<sup>57</sup>

- a. Materi yang disajikan dalam media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks.

---

<sup>55</sup> Andera Dworkin, “*Pornography*” Stevi Jackson (ed.), New York: Columbia University Press, 1996. Dalam Sulistyowati Iriano, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 299

<sup>56</sup> Tjipta Lesmana, *Op. Cit*, hlm. 11

<sup>57</sup> Ade Armando. Mengupas Batas Pornografi, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2004, hlm. 2

- b. Materi tersebut dapat berupa media elektronik maupun cetak, secara audio dan atau visual. Menjelaskan lebih lanjut bahwa, apabila sesuatu yang membangkitkan hasrat seksual tidak ditampilkan dalam media, maka hal tersebut tidak masuk dalam kategori pornografi. Sebagaimana contoh jika wanita menggunakan pakaian terbuka dalam pesta dan pelacur berdiri dalam kompleks lokalisasi untuk menawarkan jasa seks komersial.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (yang selanjutnya disebut sebagai UU Pornografi) menjelaskan definisi pornografi itu sendiri.<sup>58</sup>

*Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menjelaskan bahwa pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*

Berdasarkan ayat 1 Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa dalam hal yang mengandung unsur cabul atau porno tersebut antara lain:<sup>59</sup>

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi anak.

---

<sup>58</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

<sup>59</sup> Ayat 1 Pasal 4 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Definisi Pornografi seperti yang dijelaskan dalam UU Pornografi secara jelas meluaskan dalam berbagai bentuk atas pornografi itu sendiri. Hal tersebut dilakukan dikarenakan kemajuan zaman yang membuat teknologi berkembang pesat, sehingga diperlukan tindakan represif atas segala bentuk dari hal yang berbau porno.

Terkait jelas bahwa teknologi membuat pornografi tersebut juga semakin luas, yang mengakibatkan jenis-jenis pornografi juga semakin banyak. Menurut Ade Armando, media yang dapat terkandung unsur pornografi di dalamnya yakni sebagai berikut:

1. Media audio atau dengar, layaknya siaran radio, kaset, *Compact Disk* (CD), telepon, ragam media audio lain yang dapat diakses di dunia maya dalam hal ini internet:
  - a) Lagu yang terdapat lirik mesum, lagu yang mengandung suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual.
  - b) Program radio dalam hal ini penyiar dan atau pendengar berbicara yang merujuk pada hal atau gaya mesum.
  - c) Jasa yang melayani pembicaraan tentang seks melalui telepon (*party line*)
2. Media pandang-dengar (audio-visual) seperti contoh program siaran televisi, film layar lebar, video, laser disc, atau ragam media lain yang terdapat dalam internet:
  - a) Film yang terkandung di dalamnya konten mesum atau menampilkan pemeran yang tampil dengan memakai



pakaian minim yakni membuat anggapan dengan tidak berpakaian.

- b) Pertunjukan teatrikal musik dimana penyanyi, pemain musik atau penari latar hadir dengan tampilan dan gerak yang membuat bangkit syahwat para penonton.

3. Media pandang (visual) layaknya koran, tabloid, majalah, buku dalam hal ini karya sastra, novel dan buku non-fiksi, lukisan foto dan lain-lain:

- a) Berita, cerita atau artikel yang memuat gambar aktivitas seks secara jelas atau memang dibuat untuk merangsang hasrat seksual pembaca
- b) Gambat foto adegan seks atau artis yang menampilkan dengan gaya yang dapat membangkitkan daya tarik seksual
- c) Iklan di media cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual.

4. Melalui perkembangannya ragam pornografi secara muatan dapat disederhanakan menjadi tiga jenis yakni: <sup>60</sup>

- a) *Hardcore*, dalam Indonesia sering dikenal dengan sebutan *triple X (X rated)*, materi orang dewasa dan materi seksual yang secara eksplisit terpampang, seperti halnya penampilan aktivitas alat genital dan aktivitas seksual.

---

<sup>60</sup> Ade Armando, Op.cit, hlm. 3

- b) *Softcore*, hadir materi pornografi berupa ketelanjangan, scene atau adegan yang memberikan kesan terjadinya hubungan seks dan seksual secara tersimulasi.
- c) *Obscenity* (kecabulan), bilamana sesuatu tersebut mempertontonkan materi seksualitas yang menentang secara ofensif batas dari kesusilaan dalam masyarakat, yang tidak layak dipertontonkan, tidak mempunyai nilai artistik, sastra, politik dan secara saintifik atau ilmiah. Dalam hal ini dapat dikelompokkan sebagai pornografi anak, yakni menggunakan anak sebagai objek, serta sesuatu yang dapat merendahkan martabat manusia itu sendiri dengan menggunakan kekerasan atau sadisme.

## **2. Tinjauan Tentang Tayangan Yang Mengandung Pornografi**

Melihat dari semua media komunikasi massa yang ada seperti televisi dan surat kabar, bahwa seluruhnya terdapat tayangan yang bertujuan untuk menarik para konsumen baik dalam media surat kabar maupun televisi. Menurut Chaidir Rachman dalam Departemen Penerangan Republik Indonesia<sup>61</sup>, pada hakekatnya tayangan merupakan sebuah perpaduan hasil penanaman modal, ditambah ide atau gambaran tentang harapan atau sasaran capaian dalam kaitannya sebagai gagasan, skill melalui pembentukan kelompok kerja yang didukung kelayakan kreativitas disamping keahlian, penguasaan alat dan teknologi, perangkat alat, perangkat

---

<sup>61</sup> Departemen Penerangan RI, *Festival Film Indonesia*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1989, hal. 57

studi, termasuk bahan baku, proses perizinan dan rekomendasi serta gambaran sasaran penunjang berupa marketing publikasi atau promosi dan pendistribusian dengan sasaran akhir yaitu masyarakat penonton. ”

Tayangan dalam media massa memiliki pengaruh yang sangat besar. Pengaruh dalam hal ini merupakan pengaruh yang tidak baik pada penontonnya, sebab masih sering kita jumpai tayangan-tayangan yang berakibat tidak baik pada penontonnya.<sup>62</sup> “ Tayangan atau adegan yang tidak selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dalam hal ini seperti tayangan sadistik, adegan kelabu dan tayangan hidup mewah yang sengaja ada dalam sebuah tayangan film hanya sebagai alasan guna mengejar profit komersial. ”

Menurut Siregar dalam Rulia Kurniasih<sup>63</sup> bahwa tayangan yang mengandung unsur kekerasan adalah segala bentuk adegan dalam televisi dengan tema menonjolkan masalah fisik dalam suatu konflik. ” Hal tersebut dijelaskan selaras dengan tayangan yang mengandung unsur kekerasan merupakan adegan yang dalam tayangannya atau alur ceritanya menampilkan adegan kekerasan.<sup>64</sup> “ Kekerasan dalam hal ini adalah tingkah laku seperti pembunuhan, penganiayaan, perkelahian, peperangan dan bentuk tingkah laku lain yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk merusak, mencelakai orang lain atau sebagai pemecahan dari sebuah masalah.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup>Departemen Penerangan RI, Ibid, hlm. 57

<sup>63</sup>Rita L Atkinson, *Pengantar Psikologi II*, Jakarta: Erlangga, 2001, hal. 69

<sup>64</sup>Rulia Kurniasih, *Hubungan Antara Melihat Film Kekerasan Di Televisi dan Pendidikan Agama Dengan Tingkat Kenakalan Siswa SLTP Surakarta*, Surakarta: UNS Press, hlm. 12

<sup>65</sup>Rita L Atkinson, *Pengantar Psikologi II*, Jakarta: Erlangga, 2001, hal. 69

Berdasarkan uraian diatas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tayangan yang mengandung unsur kekerasan merupakan adegan yang dalam ceritanya banyak memuat kekerasan, seperti pertengkaran, permusuhan, perkelahian, penganiayaan, dan pembunuhan baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat tertentu.

### **3. Pengaturan Mengenai Larangan Penyiaran Siaran Konten Pornografi**

Dilihat dari sudut pandang hukum pidana dalam hal ini pornografi dapat masuk sebagai sebuah tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut dikarenakan bahwa masyarakat menilai secara umum pornografi sebagai bentuk kejahatan dan bertentangan dengan hukum dan norma yang berada di masyarakat. Baik mengenai perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau konten yang bermuatan pornografi dapat dikatakan bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat.

Problematika mengenai seks tersendiri merupakan ruang yang sangat pribadi atau privasi setiap individu dan bukan untuk diperlihatkan bahkan disebarluaskan pada setiap orang. Masyarakat berhak untuk melindungi diri dari segala hal yang dianggap immoral, baik yang bersifat sekedar bertentangan dengan standar moralitas yang ada (seperti halnya pornografi), ataupun yang dikhawatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental pada tatanan nilai dan tata hubungan sosial yang masih hidup dan diakui, seperti contoh tuntutan melegalkan homoseksual. Realisasi hal itu merupakan penggunaan institusi perangkat hukum yang ada dalam masyarakat.

Berakibat pada pelarangan pornografi dan memasukkannya sebagai sebuah tindak kejahatan.<sup>66</sup>

Pembahasan mengenai tindak pidana atau kejahatan merupakan istilah Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni “*Strafbaarfiet*”. Apa yang dimaksud sebagai sebuah delict atau *Strafbaarfiet* menurut Satochid Kartanegara adalah:<sup>67</sup>

- a. Pelanggaran atau perkosaan kepentingan umum (*schending of krenking van een rechtsbelang*)
- b. Sesuatu hal yang membahayakan kepentingan umum (*het gevaar brengen van een rechtsbelang*).

Menambahkan pendapat sebelumnya, bahwa secara umum sebagaimana yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* atau tindak pidana yakni: “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Rasuanto, *Pornografi: Soal Etika, Bukan Estetika*, diunduh pada <http://www.kompas.com/kompas%2dcetak/9908/11/opini/porn04.htm>, Dalam *Irma Runtianing, Kejahatan Pornografi: Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya Di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Islamica, vol. 10 no. 2, STAIN Press: Ponorogo, 2013, hlm. 5

<sup>67</sup>Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 69

<sup>68</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 172

Ketentuan mengenai pemberlakuan tindak pidana pornografi melalui media terdapat dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHP) yang tertulis sebagai berikut: <sup>69</sup>

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menuga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Kalau bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Selain pada KUHP aturan mengenai pornografi diatur lebih khusus pada UU Pornografi. Dalam UU Pornografi, juga mengatur dan melarang mengenai penyiaran yang mengandung konten pornografi oleh seluruh pihak baik

---

<sup>69</sup> Pasal 282 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

perseorangan maupun oleh badan hukum. Dalam Pasal 4 UU Pornografi menyebutkan yaitu sebagai berikut:<sup>70</sup>

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*
  - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang*
  - b. Kekerasan seksual*
  - c. Masturbasi atau onani*
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan*
  - e. Alat kelamin atau*
  - f. Pornografi anak.*
- (2) Setiap orang yang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:*
  - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan*
  - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin*
  - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau*
  - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.*

Dalam hal ini Pasal 1 angka 3 UU Pornografi memperluas mengenai definisi mengenai orang tersendiri, yakni termasuk juga korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. UU Pornografi memberikan persyaratan korporasi yang menjadi subyek hukum tindak pidana korporasi, serta beban pertanggungjawaban pidananya.

Hal yang menyangkut mengenai penyiaran pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Melalui Pasal 27 UU ITE melarang dan mengatur segala macam hal yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya dan berkaitan dengan teknologi yang berkembang pesat. Secara tersirat segala perbuatan yang

---

<sup>70</sup> Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Loc.cit, hal.20

dilarang adalah termasuk mengenai pornografi, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>71</sup>

*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*

Mengenai dokumen elektronik dapat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4

UU ITE, yakni :<sup>72</sup>

*pengertian dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, surat elektronik, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Dalam UU ITE tidak menjelaskan secara detail mengenai sarana penyaluran, petransmisian maupun pengaksesannya. Secara umum dalam pasal UU ITE menggunakan objek antara lain sistem elektronik, komputer dan internet. Dalam hal ini terdapat pelayanan jasa yang disediakan oleh korporasi yang menyediakan jasa penyiaran televisi yang dapat langsung terhubung dengan internet.

Peraturan terakhir yang mengatur pelarangan penyiaran yang mengandung konten Pornografi adalah UU Penyiaran. Dalam Pasal 57 huruf d UU Penyiaran dalam menindak lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan siaran yang memuat konten cabul.<sup>73</sup> Pasal 58 huruf d UU

---

<sup>71</sup> Pasal 27 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>72</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang ITE

<sup>73</sup> Pasal 57 Huruf D Undang – Undang Penyiaran



Penyiaran, mengatur penyiaran iklan niaga oleh lembaga penyiaran lembaga penyiaran televisi, yang memuat tindak pidana pornografi.<sup>74</sup> Sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran bahwa mengenai isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalagunaan narkotika dan obat terlarang atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan.<sup>75</sup>

Selanjutnya, terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 57 huruf d UU Penyiaran, sebagai berikut:<sup>76</sup>

*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.*

Pasal 46 ayat (3) UU Penyiaran mengatur mengenai aturan-aturan larangan lembaga penyiaran televisi dalam menyiarkan iklan komersial.

Pasal 46 ayat (3) tertulis bahwa siaran iklan niaga dilarang melakukan:<sup>77</sup>

- a. *Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain*
- b. *Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif*
- c. *Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok*
- d. *Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama dan/atau*
- e. *Eksplorasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.”*

Mengenai hal ini jika lembaga penyiaran televisi menyiarkan program siaran yang memiliki konten pornografi, maka dapat dipidana dengan Pasal

---

<sup>74</sup> Pasal 58 Huruf D Undang – Undang Penyiaran

<sup>75</sup> Pasal 36 Ayat 5 UU Penyiaran

<sup>76</sup> Undang – Undang Penyiaran, *Op.cit*, hlm. 28

<sup>77</sup> Pasal 46 Ayat 3 Undang – Undang Peyiaran

57 huruf d UU Penyiaran. Jika, lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan iklan komersial yang memuat pornografi, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 58 huruf d dengan ketentuan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **F. Teori Efektifitas Hukum**

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan mengejewantah sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>78</sup> Wayne La-Favre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri disetiap situasi yang dihadapi) yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, Wayne La-Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Melakukan penegakan hukum ada beberapa pendekatan, pendekatan tersebut adalah :<sup>79</sup>

- a. Pendekatan yuridis, yaitu penerapan norma atau ketentuan hukum secara tepat dan benar sesuai dengan keyakinan penegakan hukum.

---

<sup>78</sup>Soerjono Soekanto, 1979, "*Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*", Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 07

- b. Pendekatan sosiologis politik, yakni untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondisional yang diperlukan sebagai kelangsungan pembangunan Nasional serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pendekatan sosiologis cultural, yakni penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut lebih terpenuhi, dan akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada aparat penegak hukum<sup>80</sup>

Dalam proses penegakan hukum sanksi juga diperlukan agar efektivitas penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Sistem sanksi tersebut adalah :<sup>81</sup>

- a. Sanksi yuridis, yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil
- b. Sanksi sosial, yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang melanggar norma-norma, biasanya berupa pengucilan sosial.
- c. Sanksi spiritual, yakni rasa bersalah yang ada pada diri sendiri. Dia merasa bersalah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melakukan pelanggaran.

---

<sup>80</sup> Sukarton Marmosudjono, 1989, Penegakan Hukum Di Negara Pancasila, (Jakarta, Pt Garuda Metropolitan Pres), hal 20-21.

<sup>81</sup> Ibid hal 23

## 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Selain pendekatan dan sistem pemberian sanksi dalam pelaksanaannya, penegakan hukum memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karena faktor-faktor ini merupakan esensi dari efektivitas penegakan hukum. Agar efektivitas hukum terjadi maka faktor-faktor penegakan hukum harus dipenuhi.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

### 1) Faktor hukumnya

Faktor pertama adalah hukum itu sendiri atau substansi hukum, apakah hukum itu sudah baik atau belum, apakah sudah adil atau tidak, apakah sanksi hukumnya sudah sesuai atau belum. Faktor substansi hukum terdiri dari :

- a. Yuridis, apabila terbentuknya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi atau terbentuknya Undang-undang tersebut sesuai dengan tata cara yang diterapkan, dan dibentuk oleh badan Negara (Teori Stufen Bau oleh Hans Keslen).
- b. Sosiologis, kaidah itu efektif jika Negara dapat memaksakan keberlakuan hukum kepada masyarakat. Keberlakuan hukum dapat dipaksakan oleh penguasa walaupun diterima atau tidak oleh masyarakat (*The Power Of Theory*/Teori Kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diakui dan diterima oleh

masyarakat secara paksaan atau sukarela (The Recognition Theory/Teori Pengakuan).

- c. Filosofi, apabila undang-undang tersebut sesuai dengan cita-cita hukum Negara. Sesuai dengan cita-cita hukum Negara Indonesia yaitu Pancasila.<sup>82</sup>

Hambatan untuk melakukan penegakan hukum juga berasal dari hukum itu sendiri. Hambatan yang berasal dari hukum itu sendiri atau Undang-Undang adalah sebagai berikut :<sup>83</sup>

1. Tidak diikutinya azas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

#### **1. Faktor aparat**

Ruang lingkup penegak hukum adalah luas sekali, mencakup penegak yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak langsung adalah yang langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum yang berkecimpung secara tidak langsung adalah yang bertugas menyusun peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan

---

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2010, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 05

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, Ibid, hal 17-18

penegakan hukum adalah yang berkecimpung secara langsung dalam proses penegakan hukum.

Penegak hukum adalah panutan dari masyarakat yang harusnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu agar dapat menerapkan peranannya dengan maksimal. Namun banyak dijumpai penegak hukum yang memiliki hambatan dalam melakukan peranannya Hal ini mungkin berasal dari diri pribadi para penegak hukum. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :<sup>84</sup>

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Keinginan yang sangat terbata untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebebnarnya merupakan pasangan konservatisme.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh penegak hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri mereka untuk memiliki sikap-sikap seperti berikut :<sup>85</sup>

1. Terbuka
2. Peka

---

<sup>84</sup> Ibid hal 34-35

<sup>85</sup> Ibid hal 35-36.

3. Menyadari potensi yang ada dalam dirinya
4. Siap dengan perubahan yang ada
5. Memiliki informasi yang lengkap
6. Menyadari dan menghormati hak dan kewajiban maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain
7. Berpegang teguh pada keputusan yang telah diambil dengan dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Aparat penegak hukum seharusnya melakukan tugas dan wewenang mereka sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur keberadaan mereka. Penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim. Aparat penegak hukum tersebut mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang tugas dan wewenang masing-masing. Namun penelitian ini hanya akan membahas mengenai polisi sebagai penegak hukum.

## **2. Faktor sarana atau fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan hal-hal yang dibutuhkan. Sarana yang ada di Indonesia saat ini memang diakui masih sangat jauh dibandingkan dengan negara maju yang memiliki sarana lengkap dan didukung teknologi yang canggih di dalam membantu proses penegakkan hukum. Sarana atau fasilitas tidak boleh luput dari perhatian sebagai bagian dari faktor penegakan hukum.

Perhatian terhadap sarana atau fasilitas harus diberikan sebagai langkah kongkrit supaya penegakan hukum bisa berjalan secara optimal.

#### 1) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum di masyarakat dipengaruhi oleh adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Usaha untuk mengetahui tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dapat dilihat dari penegakan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma dan perilaku hukum : <sup>86</sup>

1. Pengetahuan hukum. Masyarakat dianggap tahu bahwa secara konseptual terdapat beberapa perbuatan yang sudah diatur oleh hukum baik berwujud hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
2. Pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pada pemahaman kaidah-kaidah hukum, masyarakat mulai menghayati isi aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Dari pemahaman tersebut masyarakat mulai menganalisis tentang tujuan dan tugas hukum.

---

<sup>86</sup> Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, 2007, Jakarta, Rinerka Cipta, hlm.66



3. Sikap terhadap norma-norma. Masyarakat pada tahap ini dapat memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) maupun norma-norma yang hidup dan bertumbuh dalam, masyarakat. Penilaian terhadap norma-norma tersebut biasanya berupa nilai yang dianggap baik dan nilai yang dianggap buruk.
4. Perilaku hukum. Masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hal ini berarti masyarakat telah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi.

## 2) Faktor kebudayaan

Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Kebudayaan merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Kebudayaan yang menentukan sikap, ide-ide dan nilai-nilai seseorang terhadap hukum di masyarakat. Dari lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka penelitian ini hanya akan membahas faktor aparat, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan faktor budaya.